



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239
Email : dishubpesisirselatan2017@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 821/35/Kpts/Dishub-PS/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 821/24/Kpts/Dishub-PS/2023

TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUP DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. Sdr. Dedi Harisandu, SE tanggal 06 Oktober 2023, maka untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan perubahan atas lampiran keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 821/24/Kpts/Dishub-PS/2023 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa maksud point a tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/248/Kpts-BPT-PS/2023, tanggal 17 Maret 2023 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lajur 4 dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 7 lampiran keputusan ini.

KEDUA

: ***Tugas kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sbb :***

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

KETIGA

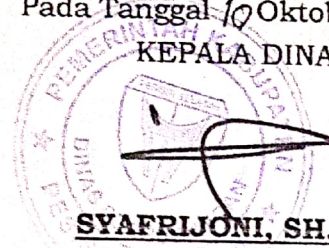
: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 10 Oktober 2023

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip

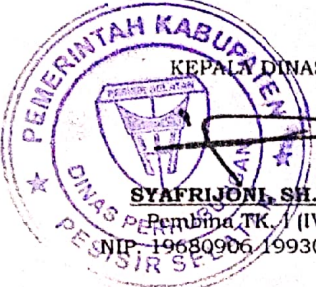
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 821/35/Kpts/Dishub-PS/2023
 TANGGAL : 10 OKTOBER 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 821/24/Kpts/Dishub-PS/2023
 TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUP DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	LAMA		BARU		DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA
	NAMA/NIP/GOL.	JABATAN	NAMA/NIP/GOL.	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	VERAWATI, S.Sos 19760605 200801 2 029 Penata Tk.1 (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	VERAWATI, S.Sos 19760605 200801 2 029	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PPTK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD III. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Sub Kegiatan : 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

2	3	4	5	6	7
AFFANDI, S.Sos 19780928 200701 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pj. Kepala Seksi Angkutan	AFFANDI, S.Sos 19780928 200701 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pj. Kepala Seksi Angkutan	PPTK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
RENO EFFENDI, S.Sos 19801115 200701 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pj. Kepala Seksi Keselamatan	RENO EFFENDI, S.Sos 19801115 200701 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pj. Kepala Seksi Keselamatan	PPTK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan II. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
EDDY RICARDO, SH 19690514 200604 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Lalu Lintas	EDDY RICARDO, SH 19690514 200604 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Lalu Lintas	PPTK	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ) I. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - Operasional Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
YENDRA RIVA'I, ST 19730307 200701 1 008 Penata (III/c)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	YENDRA RIVA'I, ST 19730307 200701 1 008 Penata (III/c)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PPTK	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ) I. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1	2	3	4	5	6	7
7.	RAFLENOFA YULANDA, S 19760719 200501 1 012 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	RAFLENOFA YULANDA, SE 19760719 200501 1 012 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	PPTK	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ) I. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan - Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
6.	DEDI HARISANDU, SE 19850131 200801 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pj. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana	NOVAN ANDREW, SH 19841122 202010 1 005 Penata Muda (III/a)	Staf	PPTK	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ) I. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Pembangunan Penerangan Jalan Umum
8.	NOFRIZON, S.Sos 19711106 200701 1 002 Penata (III/c)	Pj. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	NOFRIZON, S.Sos 19711106 200701 1 002 Penata (III/c)	Pj. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	PPTK	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ) I. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ K Kota PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ) I. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jal Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6	7
	ERMAN JUSA, SH 19730301 199403 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Staf	ERMAN JUSA, SH 19730301 199403 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Staf	PPTK	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN I. Kegiatan Penetapan Lintas Pelayaran dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/kota - Pengawasan dan Pengendalian LLAL (Operasional Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut)


KEPALA DINAS
SYAFRIJONI, SH. M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19680906 199308 1 001